



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

DKI Bingung Serap Anggaran

Penerimaan Daerah Baru Capai 13 Persen

MENYANDANG sebagai provinsi dengan penyerapan anggaran terendah se-Indonesia, membuat Pemprov DKI Jakarta berada dalam sorotan tajam. Kali ini datang dari Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah.

Menurut Amir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta saat ini baru mencapai 13 persen dari target sebesar Rp 49 triliun pada 2015. Sementara itu, dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 8 triliun belum diterima dengan alasan kinerja penyerapan ibukota. "Sebaiknya Pemprov DKI Jakarta jujur bahwa saat ini PAD mereka terancam tidak tercapai," ujar dia kepada INDOPOS, kemarin (27/8).

Amir mengungkapkan, ancaman tidak tercapainya PAD, dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya, beban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang besar yang diberikan pemprov untuk warga Jakarta. Bagaimana tidak, setelah menaikkan nilai PBB hingga 200 persen pada 2014, pada tahun ini DKI juga kembali menaikkan PBB sebesar 20 persen. "Akibatnya banyak warga yang tidak mampu membayar PBB. Sehingga pendapatan yang didapat pemprov menjadi terhambat," kata dia.

Bila PAD rendah, sambung dia, tentu anggaran yang diserap juga rendah. "Dari sini bisa kita lihat, bahwa Pemprov DKI selama ini gembar-gembor memiliki banyak anggaran, nyatanya PADnya rendah," ucap dia. Diskusi dalam rangka implementasi arahan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu terkait lamanya anggaran dicairkan. "DKI saya asumsikan oke (penyerapan), kalau memang takut sampaikan takutnya dimana. Menurut saya bukan takut, tapi bingung nyolongnya dimana," kata Ahok. Dia mengatakan, hal tersebut mempengaruhi anggaran di DKI belum terserap dengan baik dan banyak proyek yang

belum berjalan sempurna. Oleh karena itu, Basuki pun menyimpulkan keterlambatan tersebut juga karena banyak harga barang satuan yang digelembungkan (mark up). "Tapi kita sengaja loloskan di e-budgeting (anggaran 2015). DKI ini baru benar-benar melakukan prosedur penganggaran sesuai aturan di APBD 2016. Tidak apa-apa, masukkan dulu saja harga satuannya pun rata-rata mark-up," kata dia.

Ahok mencontohkan, pembangunan sebuah GOR saja dibutuhkan Rp 48 miliar. Pa-

la mengatakan, pembelian barang inilah yang akhirnya tarik ulur karena para SKPD/UKPD ini ketakutan. Menurutnya, ketakutan itu tidak perlu terjadi. Basuki juga mengatakan, dari kasus pengadaan alat catu daya (uninterruptable power supply/UPS) yang bermasalah, pihaknya bisa melihat kinerja Dinas Pendidikan yang buruk karena menyusun barang-barang yang dibeli dilakukan pihak ketiga. Hal tersebut membuat mereka kaget ketika diajak bekerja menyusun anggaran dengan benar dan ternyata tidak bisa.

Contoh lainnya, pembelian lahan untuk puskesmas di Pancoran, Jakarta Selatan. Dengan harga appraisal yang sudah ada tapi tidak bisa direalisasikan. Demikian juga lahan untuk MRT yang belum deal karena masyarakat mengaku ada yang minta komisi. Itulah yang membuat orang yang mau menjual tanah jadi enggan lagi memberikannya. "Serapannya sedikit tidak apa-apa, jadi lebih baik saya kunci daripada dipakai macam-macam. Kalau saya izinkan nyolong, serapannya pasti kencang," tukas dia. (wok)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta seluruh satuan/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak takut mengeksekusi berbagai proyek yang dianggarkan. Terutama untuk pembelian lahan. Hal tersebut disampaikannya ketika memberi arahan dalam diskusi panel tentang kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan anggaran di Kompleks Balaikota DKI Jakarta, kemarin (27/8).

Diskusi dalam rangka implementasi arahan Presiden Joko Widodo di Bogor beberapa waktu lalu terkait lamanya anggaran dicairkan. "DKI saya asumsikan oke (penyerapan), kalau memang takut sampaikan takutnya dimana. Menurut saya bukan takut, tapi bingung nyolongnya dimana," kata Ahok.

Dia mengatakan, hal tersebut mempengaruhi anggaran di DKI belum terserap dengan baik dan banyak proyek yang

belum berjalan sempurna. Oleh karena itu, Basuki pun menyimpulkan keterlambatan tersebut juga karena banyak harga barang satuan yang digelembungkan (mark up). "Tapi kita sengaja loloskan di e-budgeting (anggaran 2015). DKI ini baru benar-benar melakukan prosedur penganggaran sesuai aturan di APBD 2016. Tidak apa-apa, masukkan dulu saja harga satuannya pun rata-rata mark-up," kata dia.

Ahok mencontohkan, pembangunan sebuah GOR saja dibutuhkan Rp 48 miliar. Pa-

Ahok mencontohkan, pembangunan sebuah GOR saja dibutuhkan Rp 48 miliar. Pa-

Pencapaian PAD Terkini

- Sebanyak 13 persen dari target Rp 49 triliun pada 2015
- DKI belum terima dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 8 triliun dengan alasan kinerja penyerapan anggaran
- Kondisi disebabkan beban Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
 - Tahun 2014, PBB naik 200%
 - Tahun 2015, PBB naik 20%
- Banyak warga yang tidak mampu membayar PBB
- Pendapatan terhambat

Penilaian Gubernur Ahok

- Keterlambatan penyerapan lantaran banyak harga barang satuan yang digelembungkan (mark up)
- Sengaja diloloskan di e-budgeting (anggaran 2015)
- DKI murni melaksanakan prosedur penganggaran sesuai aturan di APBD-2016

